



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN PPUU DPD RI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU
PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN TAHUN 2020-
2024**

TANGGAL 14 Januari 2021

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: Ili
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Kamis, 14 Januari 2021.
Pukul	: 19.40 WIB s/d 21.55 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1.
Acara	: Pengambilan Keputusan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg/F-Gerindra) Widiharto, SH., MH.
Sekretaris Hadir	: - Fisik: 22 orang, virtual: 33 orang, izin: 3 orang dari 80 orang Anggota Baleg yang terdiri dari 9 Fraksi. - Menkumham beserta jajaran.
Undangan	: - Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dipimpin dan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. pukul 19.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020-2024, menyetujui untuk menyepakati:

1. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) RUU yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) RUU diusulkan oleh DPR RI dengan catatan 2 (dua) RUU diusulkan bersama dengan Pemerintah, 9 (sembilan) RUU diusulkan oleh DPR RI, dan 2 (dua) RUU diusulkan oleh DPD RI, dengan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Prolegnas.
2. Perubahan jumlah RUU dalam Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) RUU, karena:
 - a. Penggabungan RUU tentang Penilai (No. urut 220), RUU tentang Perlelangan (No. urut 221), dan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (No. urut 222) ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (No. urut 215);
 - b. penggantian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (No. urut 194) dengan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; dan
 - c. penambahan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

III. PENUTUP.

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua PPUU DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 ditutup pukul 21.55 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2021
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001